

ADAM MALIK

SEPULUH TAHUN POLITIK LUAR NEGERI ORDE BARU



YAYASAN *idayu*

ADAM MALIK

YAYASAN IDAYU
Gedung Kebangkitan Nasional — Jl. Abdulrahman Saleh 26.
P.O.Box. 48 Jkt — Jakarta Pusat

1. DR. MOHAMMAD HATTA
Pikiran-pikiran dalam bidang ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata
1976. (cetakan ke. 3) Rp. 450.-
2. DR. MOHAMMAD HATTA
Menuju negara hukum
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 500.-
3. DR. MOHAMMAD HATTA
Berpertisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Nasional Indonesia
1976. (cetakan ke. 1) Rp. 350.-
4. DR. H. ROESLAN ABDULGANI
Almarhum Dr. Soetomo yang saya kenal
1976. (cetakan ke. 2) Rp. 450.-
5. DR. H. ROESLAN ABDULGANI
100 Hari di Surabaya
1976. (cetakan ke. 2) Rp. 850.-
6. DR. H. ROESLAN ABDULGANI
Sejarah, cita-cita dan pengaruhnya Konperensi Asia - Afrika Bandung
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 400.-
7. DR. H. ROESLAN ABDULGANI
Pengembangan Panca Sila di Indonesia
1976. (cetakan ke. 1) Rp. 450.-
8. KI AGENG SURYOMENTARAM
Filsafat Rasa Hidup
1976. (cetakan ke. 2) Rp. 450.-
9. KI AGENG SURYOMENTARAM
Ukuran keempat
1976. (cetakan ke. 2) Rp. 400.-
10. KI AGENG SURYOMENTARAM
Wejangan pokok Ilmu Bahagia
1976. (cetakan ke. 2) Rp. 400.-
11. KI AGENG SURYOMENTARAM
Ilmu Jiwa Kramadangsa
1976. (cetakan ke. 1) Rp. 300.-
12. KI AGENG SURYOMENTARAM
Rasa Bebas
1976. (cetakan ke. 1) Rp. 200.-
13. KI AGENG SURYOMENTARAM
Mawas Diri
1976. (cetakan ke. 1) Rp. 250.-
14. Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
Sejarah sebagai pedoman untuk membangun Masa depan
1976. (cetakan ke. 2) Rp. 575.-
15. Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
Islam ditinjau dari kacamata Modern
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 350.-
16. Prof. AHMAD SUBARDJO DJOJOADISURYO
Peranan Ide-Ide dalam pergerakan Kemerdekaan Indonesia
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 400.-

SEPULUH TAHUN POLITIK LUAR NEGERI ORDE BARU

Ceramah pada tanggal 7 Agustus 1976
di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta

YAYASAN IDAYU — JAKARTA 1976

Yayasan Idayu
Gedung Kebangkitan Nasional
Jl. Dr. Abdulrahman Saleh 26.
Jakarta Pusat



KATA PENGANTAR

Bapak Menteri Luar Negeri Adam Malik secara ringkas dan dalam garis besarnya telah mengemukakan di sini pokok-dasar, tujuan dan cara-cara pelaksanaan politik Luar Negeri Republik Indonesia selama sepuluh tahun kita berada dalam Orde Baru sekarang ini.

Menurut Adam Malik, Republik Indonesia selama 10 tahun terakhir ini telah berhasil dengan politik Luar Negerinya yang bebas dan aktif dalam memberikan sumbangan yang positif bagi usaha-usaha pembangunan Indonesia di segala bidang, bagi usaha memperkokoh perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan usaha membantu tercapainya perdamaian dunia.

Terserahlah kepada pembaca menilai, memahami dan menilinya secara seksama.

Terima kasih.

Penerbit.

DAFTAR ISI

Sepuluh tahun politik Luar Negeri	5
Situasi Internasional	6
Keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara	11
Persoalan Timor Timur	15
Kerjasama ekonomi Luar Negeri	18
Hubungan dengan Negara-Negara Besar	25
Non Aligned	30
Perserikatan Bangsa-Bangsa	33

SEPULUH TAHUN POLITIK LUAR NEGERI ORDE BARU

Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Pengurus Idayu, dan maaf kepada saudara-saudara yang sudah datang menunggu. Seperti saudara-saudara ketahui memang saya tidak sengaja untuk datang terlambat, tetapi tamu datang. Jadi mengusir tamu itu tidak bisa. Saya lamen sebentar, baru datang ke tempat ini. Itulah alasannya mengapa saudara lebih dulu datang dan saya belakangan.

Saudara-saudara sekalian. Kalau saudara lihat kepada judul ini jangan kaget karena kertas-kertas ini ini bisa tipis bisa tebal. Saya, dengan saudara-saudara di kantor, telah menyusun suatu pidato tentang 10 tahun politik luar negeri, tetapi itu tidak mudah. Oleh karena kita bisa menempuh macam-macam sistem atau metode. Kalau cara yang paling praktis tentu kita bikin secara kronologis. Tanggal satu bulan ini, kejadian ini, kejadian itu. Tetapi saya kira saudara akan bosan nanti mendengarnya. Oleh karena itu tidak maksud saya untuk memberikan bahan menulis buku buat saudara. Oleh karena itu tentu yang paling penting buat kita, *apa yang dilakukan oleh pemerintah atau Republik Indonesia selama 10 tahun yang kita sebut Orde Baru ini*. Ini yang pokok. Saya kira ini yang penting. Ada hubungannya dengan keadaan dalam negeri kita, ada hubungannya dengan perkembangan di luar negeri. Dari situ kita mengetahui politik luar negeri kita itu benar atau tidak di samping tentu ada dasarnya. Dasar inilah di sini yang akan saya kemukakan. Atas dasar inilah saya mencoba menyampaikan kepada saudara-saudara, terutama ya seadanya ! Jangan saudara pikir, wah ini sudah komplit. Belum ! Ini disesuaikan dengan keadaan yang dapat kira-kira diterima oleh saudara-saudara pada hari ini, yang saya anggap sudah cukup memadai.

SITUASI INTERNASIONAL

Sebelum menerangkan tentang kebijaksanaan politik luar negeri selama sepuluh tahun Orde Baru, baiklah saya memberi gambaran dengan cara sangat singkat tentang situasi internasional selama masa itu. Sebab situasi itu sangat penting bagi perumusan politik luar negeri kita.

Situasi perang dingin yang meliputi dunia telah menimbulkan krisis-krisis sangat berbahaya seperti krisis Berlin tahun 1961 dan krisis peluru kendali di Cuba tahun 1962.

Keadaan tadi telah mendorong kedua negara raksasa Amerika Serikat dan Uni Sovyet lebih keras lagi kearah penemuan jawaban atas pertanyaan yang selama bertahun-tahun menghantui dunia yaitu apakah akan timbul perang dunia ke-III, suatu perang nuklir di mana tidak ada pihak yang menang, tetapi seluruh ummat manusia akan hancur. Persoalan pokok berkisar pada dimilikinya persenjataan dahsyat pada kedua pihak, tetapi bukankah keduanya itu insap bahwa sebenarnya mereka itu tidak akan mempergunakan sesungguhnya senjata-senjata tersebut melainkan hanya mempergunakannya sebagai wahana untuk memaksakan kehendaknya kepada yang lain tetapi tetap dalam keadaan damai? Dan kalau demikian apakah dan bagaimanakah usaha-usaha yang mereka akan lakukan untuk mencapai tujuannya masing-masing yang pada hakekatnya tetap bertentangan dan tidak akan pernah dapat dicocokkan secara keseluruhan?

Jika detente yang secara formil kita lihat dituangkan dalam persetujuan Nixon-Brezhnev dalam tahun 1972 dapat dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan di atas namun kejadian-kejadian akhir-akhir ini sekali lagi membuktikan bahwa jawaban demikian itu adalah jawaban sementara. Sebab detente antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet itu tetap tidak menghilangkan perbedaan filsafat maupun kepentingan nasional kedua super-powers. Apalagi detente itu diinterpretasi berbeda-beda oleh kedua belah pihak. Dengan demikian detente itu bukan suatu kondisi, tetapi suatu proses yang lama yang mengenal pasang surut berupa hubungan yang baik sampai kepada ketegangan yang besar. Yang penting dalam pasang surut itu adalah tetap berlakunya dua keharusan dasar yaitu pertama bahwa ada perdamaian antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet dan kedua bahwa perlu adanya pengaturan hubungan antara kedua super-powers itu.

Apapun keredaan atau ketegangan yang kita lihat di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang, selama dua keharusan dasar itu tetap dipegang teguh oleh masing-masing pihak, makna dari detente tetap tidak berkurang.

Selanjutnya pergeseran dari dunia bi-polar ke dunia multi-polar dengan tidak hanya menampakkan pusat-pusat kekuatan baru seperti RRC, MEE, dan Jepang, tetapi juga kesatuan kokoh dari negara-negara berkembang, telah memaksa semua negara menyesuaikan diri dengan realitas yang baru ini.

Kekuatan negara-negara berkembang nampak dalam badan-badan internasional baik di dalam maupun di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan-keputusannya terutama dalam lapangan ekonomi tidak lagi dapat diabaikan oleh negara-negara besar seperti di waktu-waktu sebelumnya.

Pertentangan antara Uni Sovyet dan Republik Rakyat Cina yang makin meningkat dalam 10 tahun terakhir ini dan nampaknya tidak akan dapat kembali akrab seperti tahun 50-an dan detente Amerika Serikat — Republik Rakyat Cina juga merupakan faktor-faktor besar dalam percaturan internasional yang berpengaruh bagi tiap-tiap negara, besar maupun kecil dimanapun juga letaknya.

Mengingat akan situasi internasional tersebut di atas timbulah pertanyaan apakah politik luar negeri Indonesia selama 10 tahun terakhir ini sudah disesuaikan dengan keadaan tersebut? Dan apakah politik luar negeri kita itu dijalankan sesuai dengan fungsinya yaitu mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat?

Jika kita melihat akan rumusan landasan politik luar negeri kita dalam Orde Baru sebagai yang tercantum dalam ketetapan-ketetapan MPRS 1966 dengan pedoman kerjanya disusul dengan ketetapan MPR 1973 dengan perincian maka politik luar negeri kita itu tetap bebas aktif anti kolonialisme dan anti imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya setia kepada solidaritas Asia-Afrika dan Dasasila Bandung, juga bahwa masalah-masalah Asia harus diselesaikan oleh bangsa Asia dengan cara Asia. Inilah fakta.

Usaha-usaha pokok yang perlu dilakukan adalah memperkuat kerjasama regional, memperbesar keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara kerjasama dengan semua negara di dunia untuk menyelesai-

kan masalah-masalah internasional dan bekerjasama dengan negara-negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan bersama terutama kepentingan ekonomi.

Bawa politik kita menurut rumusan MPRS 1966 dan MPR 1973 itu tetap bebas aktif dan anti kolonialisme serta anti imperialisme dapatlah difahami.

Sebab terlepas dari cita-citanya yang subyektif dan historis yaitu hidup damai dan bersahabat dengan segala bangsa, keadaan obyektif dan masalah yang dihadapi Republik Indonesia memaksa bangsa kita dan setiap pemerintah yang mempunyai maksud yang baik terhadap rakyat kita untuk berpolitik bebas aktif.

Suatu politik yang tidak memihak antara kedua blok ideologi yang ada tetapi yang diabdikan kepada kepentingan nasional, yang akan berusaha senantiasa menyumbang kepada pengurangan ketegangan antara keduanya. Tiap-tiap penggabungan kepada kepentingan blok yang satu akan menimbulkan tentangan dari blok yang lain mengingat bahwa Indonesia, dengan letak geografisnya yang sangat strategis, kekayaan alam yang besar, dan penduduknya yang banyak, merupakan satu faktor penting dalam percaturan internasional itu.

Juga sifat politik luar negeri kita yang anti kolonialisme dan imperialisme bukan hanya disebabkan karena sejarah perjuangan kita melawan kolonialisme dan imperialisme itu tetapi karena memang keduanya bertentangan secara prinsipil dengan perikemanusiaan dan keadilan.

Politik bebas aktif anti kolonialisme dan anti imperialisme tidak hanya merupakan keharusan bagi pemerintah sebelum Orde Baru tetapi setelah Orde Baru dan juga di hari-hari yang akan datang.

Marilah kita lihat pelaksanaan politik itu dalam 10 tahun yang lalu. Memperkuat kerjasama regional dalam bentuk ASEAN memerlukan usaha-usaha untuk menghilangkan pertikaian-pertikaian antara sesama anggota.

Dari pengalaman kita dengan A.S.A. dan Maphilindo dapat kita belajar bahwa menyelesaikan pertikaian-pertikaian ini sangat penting kalau kita hendak memperkuat ASEAN. Itulah sebabnya kita menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura.

Menghentikan konfrontasi itu sangat diperlukan juga untuk kepentingan nasional Indonesia sendiri, karena meneruskan konfrontasi

akan berarti meneruskan pengorbanan dan penderitaan yang telah sekian lamanya dialami oleh rakyat kita.

Bukankah rakyat kita, setelah pengorbanan tak terhingga yang mereka berikan dalam perang kemerdekaan melawan Belanda, disusul kemudian dengan perjuangan membebaskan Irian Barat, berhak akan pembangunan dalam suasana damai dan aman sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan melangkah ke arah kemakmuran?

Sebagaimana dapat diduga sebelumnya, usaha memperkuat ASEAN mula-mula berjalan dengan lamban, tetapi itu dapat dimengerti karena kerjasama regional itu merupakan soal yang baru dan sebagaimana halnya dengan setiap kerjasama regional usaha mempadukan kepentingan nasional anggota-anggotanya dengan kepentingan regional keseluruhan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan perasaan dan pikiran tradisionil.

Tetapi akhirnya kita dapat melihat dengan nyata kemajuan-kemajuan yang dicapai ASEAN dalam pelbagai bidang.

Kerjasama ekonomi, juga menghadapi dunia luar, seperti Jepang dan MEE, redanya ketegangan mengenai pertikaian-pertikaian politik seperti masalah Sabah, kesatuan pikiran mengenai perlunya didirikan daerah damai, bebas dan netral, semua itu menandakan kemajuan dalam usaha-usaha untuk memperkuat ASEAN.

Hasil-hasil ini yang memuncak pada konferensi tingkat tinggi di Bali dengan peningkatan kerjasama dalam pelbagai bidang politik dan ekonomi sosial budaya berupa usaha-usaha yang konkret dan terperinci, merupakan bantahan bagi anggapan banyak negara semula bahwa ASEAN itu tidak akan dapat berkembang dengan baik karena banyaknya perbedaan-perbedaan antara anggotanya.

Hasil Bali diterima dengan baik oleh dunia pada umumnya yang menganggap ASEAN sebagai suatu kenyataan yang hidup dan merupakan faktor yang perlu diperhitungkan di Asia.

Saya tidak akan membawa saudara kembali kepada Çrivijaya, Majapahit. Di sana sudah cukup bukti buat kita, bahwa kedua sejarah yang tua ini, sudah memaksa kita harus menjalankan politik ini kalau kita ingin negara ini menjadi negeri yang makmur dan adil. Nanti orang akan marah kalau kita kembali ke Çrivijaya dan Majapahit. Tetapi di sana sudah diajarkan kepada kita. Tapi sudahlah kita lupakan. Kita lihat saja, bahwa demi kepentingan nasional sekarang, kita harus membentuk ASEAN. Dengan demikian mudah-

mudahan dengan keterangan saya yang terakhir sesudah Konferensi Puncak di Bali, sudah dapat kita lihat kenyataannya di sini. Sudah menjadi kenyataan di atas dunia yang kasar ini. Memang benar negara-negara komunis di Indocina menganggap ASEAN sebagai satu organisasi yang melayani kepentingan imperialism Amerika Serikat dan ditujukan kepada negara-negara komunis terutama di Asia khususnya di Indocina.

Menghadapi suara yang bernada negatif itu negara-negara ASEAN tidak beraksi keras, tetapi tetap mengulurkan tangan persahabatan dan kerjasama dengan menolak anggapan mereka tentang ASEAN itu, dengan memberikan penjelasan-penjelasan mendalam tentang organisasi ini.

Sikap demikian itu dapat dimengerti dan menurut saya sikap satu-satunya yang wajar, karena setelah 30 tahun lamanya berperang melawan kolonialisme dan campur tangan asing, untuk sebagian besar melawan Amerika Serikat, mereka masih dihinggapi trauma dan mereka perlu diberi waktu untuk melepaskannya.

Selain dari itu menurut penjelasan mereka, penilaian mengenai ASEAN itu didasarkan atas keterangan fihak Amerika Serikat dan fihak Barat lainnya, yang mengidentifikasi kepentingan mereka dengan kepentingan ASEAN.

Menurut pendapat saya, apa yang diterangkan oleh pihak Barat itu adalah urusan dan tanggung jawab mereka dan bukan urusan dan tanggung jawab kita.

Karena adanya pangkalan militer Amerika Serikat di negara ASEAN, merupakan pokok bagi pandangan negatif negara-negara Indocina itu terhadap ASEAN, maka penutupan pangkalan militer Amerika Serikat di Muangthai dan perundingan antara Filipina dan Amerika Serikat, yang menghendaki kedaulatan Filipina atas pangkalan itu maupun perpendekan masa berlakunya perjanjian pertahanan antara kedua negara itu, merupakan sumbangan bagi usaha perbaikan hubungan antara negara-negara Indocina dan negara-negara ASEAN.

Itulah sebabnya Vietnam bersedia mengadakan hubungan diplomatik dengan Filipina dan Muangthai.

Bahwa Muangthai menutup pangkalan Amerika Serikat itu dan Filipina juga ingin menguranginya, dapat difahami dengan baik, jika kita mengingat kembali bahwa di dalam deklarasi Bangkok mengenai pembentukan ASEAN, dicantumkan dengan terang bahwa pangkalan asing di anggota-anggota ASEAN itu sifatnya sementara, dan hanya

dapat ada dengan persetujuan negara-negara anggota ASEAN tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa sejak dari semula, negara-negara anggota ASEAN itu berkehendak menghapuskan atau mengurangi peranan pangkalan-pangkalan itu atau kerjasama militernya dengan negara-negara di luar ASEAN, seperti halnya dengan Malaysia dan Singapura di satu pihak dengan Inggeris dan Australia dan Selandia Baru di lain pihak, dalam rangka kerjasama militer 5 negara.

Perdamaian, kebebasan dan netralitas merupakan tujuan sangat penting negara-negara ASEAN tersebut dan tindakan Muangthai dan Filipina mengenai pangkalan militer Amerika Serikat itu merupakan satu langkah maju lagi ke arah terlaksananya deklarasi Kuala Lumpur.

Sebagai kesimpulan dapatlah dikatakan bahwa sejak didirikannya, ASEAN makin lama makin kuat, baik dalam kerjasama ekonomi, sosial budayanya maupun kerjasama politiknya. Kita akui, bahwa masih banyak kesukaran yang dihadapi, begitupun juga besar tantangan-tantangan yang ada di muka kita, tetapi kita yakin bahwa dengan bekerja dengan tekun, kesediaan kita semua untuk mendapatkan harmoni antara kepentingan nasional anggota-anggotanya dan kepentingan regional ASEAN keseluruhan, organisasi ini makin lama akan makin kuat.

ASEAN tidak akan kuat dan kerjasama regional tidak akan berhasil memakmurkan bangsa-bangsa di kawasan ini dengan sebaik-baiknya, jika tidak terdapat keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara.

Dalam hubungan ini penyelesaian pertikaian di Indocina sangat penting, dan Indonesia senantiasa berusaha menyumbang pada penyelesaian pertikaian ini.

KEAMANAN DAN STABILITAS DI ASIA TENGGARA.

Dalam hubungan ini Pemerintah Republik Indonesia menyandarkan diplomasiannya kepada ketentuan yang dikukuhkan lagi oleh MPRS 1966 bahwa persoalan Asia harus diselesaikan oleh bangsa Asia sendiri tanpa campur tangan dari luar. Pertikaian di negara-negara Indocina harus diselesaikan oleh bangsa Indocina. Indonesia bersedia memberikan jasa-jasa baiknya kepada pihak-pihak yang sedang bertikai itu.

Inisiatif Indonesia menyelenggarakan konferensi Jakarta untuk mencari penyelesaian pertikaian di Kamboja tahun 1970, harus dilihat dari sudut ini. Bawa usaha itu tidak berhasil, karena tidak semua pihak yang bertikai bersedia ikut-serta, disayangkan, tetapi tidak mengurangi kehendak kita bahwa bangsa Kamboja harus menyelesaikan pertikaianya sendiri tanpa campur tangan pihak luar.

Di Vietnam, Indonesia terus mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Vietnam Utara dan senantiasa menolak untuk menjalin hubungan demikian dengan pihak-pihak yang bertikai di Vietnam Selatan, sebelum ada satu pemerintahan untuk seluruh Vietnam Selatan.

Ketika Indonesia di minta duduk dalam I.C.C.S. dan dalam konferensi dua belas negara di Paris untuk mengukuhkan persetujuan empat pihak di Paris tentang pemulihan kembali perdamaian di Vietnam, itu berarti, bahwa semua pihak yang terlibat merasa Indonesia penting untuk ikut duduk dalam usaha pencaharian penyelesaian konflik itu. Selama bekerja sebagai anggota I.C.C.S., Indonesia senantiasa berusaha untuk bertindak tidak memihak.

Bawa akhirnya I.C.C.S. itu tidak dapat berfungsi dengan baik, disebabkan karena memang persetujuan Paris tentang Vietnam itu terlalu banyak mengandung pasal-pasal yang saling bertentangan untuk dapat dilaksanakan.

Apakah sebabnya persetujuan demikian itu sampai dapat ditandatangi oleh keempat pihak, ialah karena masing-masing berpendirian akan dapat mempergunakannya sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri.

Golongan THIEU yang mengetahui bahwa persetujuan akan merugikan dirinya, ditekan oleh Amerika Serikat untuk akhirnya menyetujui. Karena Amerika Serikat sendiri merasa tekanan berat dari rakyatnya untuk dengan segera mengakhiri perjuangan di Vietnam yang sudah terlalu lama dan tidak populer itu.

Bawa pada akhirnya kaum komunis di Vietnam itu memperoleh kemenangan, telah dapat dilihat dan diperkirakan jauh sebelumnya.

Golongan THIEU tidak berhasil mendekatkan diri pada rakyat, bantuan Amerika Serikat di salah gunakan untuk keuntungan pemimpin-pemimpinnya secara pribadi, dengan tidak mengindahkan kepentingan rakyat yang menderita.

Golongan komunis ber-ideologi kuat, berdisiplin teguh dan bersa-

ma-sama berjuang dan menderita dengan rakyat. Dalam keadaan demikian jumlah persenjataan sangat besarpun tidak dapat menolong THIEU dan golongannya.

Penolakan Congress Amerika Serikat untuk memberi bantuan lebih banyak hanya mempercepat kemenangan kaum komunis. Kejadian yang sama kita lihat di Kamboja.

Apa yang terjadi di Vietnam dan Kamboja itu merupakan pelajaran yang sangat berguna bagi kita semua. Jika kita ingin menang melawan komunisme yang penting adalah solidaritas antara Pemerintah dan Rakyat. Solidaritas yang didasarkan atas keyakinan dan bukti nyata pada rakyat bahwa Pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat banyak.

Sumbangan positif Indonesia pada usaha-usaha penyelesaian konflik di Vietnam, yang didasarkan atas prinsip-prinsip di atas, memperoleh pengakuan dari missi pemerintah Vietnam yang baru-baru ini mengunjungi Indonesia. Di dalam statement yang dikeluarkan setibanya di Jakarta, diucapkan terima kasih atas bantuan Indonesia kepada perjuangan rakyat Vietnam selama tiga puluh tahun.

Indonesia maupun seluruh negara-negara ASEAN menyambut baik pemulihan kembali perdamaian di Indocina itu.

Karena kita memahami bahwa negara-negara itu membutuhkan segala tenaga dan pikiran mereka untuk membangun kembali negara yang sangat menderita itu, kita tidak hanya mengulurkan tangan persahabatan tetapi juga tawaran untuk menyumbang kepada rehabilitasi negara mereka.

Tawaran berhubungan baik dan kerjasama itu diterima baik oleh missi Phan Hien.

Kita yakin bahwa di dalam masa yang dekat akan terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara Vietnam dan kita, serta anggota ASEAN lainnya.

Dengan Laos tidak saja terdapat hubungan yang baik, tetapi kita telah mulai memberi bantuan kepada mereka, meskipun sederhana.

Bahkan Kamboja masih belum merasa mampu menerima perwakilan-perwakilan asing banyak di negerinya, kita pahami. Kita sudah sejak permulaan mengakuinya, sehingga jalanan hubungan diplomatik hanya soal waktu saja.

Ada pihak-pihak yang berpendapat, bahwa pengunduran diri

Amerika Serikat dari Indocina itu berbahaya, karena menimbulkan vacuum yang akan diisi oleh lawan-lawan Amerika Serikat terutama oleh Uni Sovyet. Oleh karena itu di Asia Tenggara ini, seperti di Asia dan Pasifik pada umumnya, pembangunan kekuatan militer Uni Sovyet harus dihadapi dengan pembangunan kekuatan militer juga dari Amerika Serikat, supaya ada perimbangan kekuatan, yang diperlukan untuk menjaga perdamaian di Asia.

Kita tidak sependapat dengan pendirian adanya kekosongan itu. Sebab kekosongan itu dapat diisi oleh bangsa-bangsa Asia Tenggara sendiri. Perdamaian di Asia Tenggara dapat dipelihara jika terdapat hubungan baik antara semua bangsa di kawasan ini. Hubungan baik antara negara-negara ASEAN, antara negara-negara di Indocina dan hubungan baik antara negara-negara ASEAN dan Indocina.

Dan hubungan baik dan perdamaian itu hendaknya jangan diganggu oleh persaingan berbahaya, terutama persaingan kehadiran militer oleh negara-negara besar Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Biarlah negara-negara di Asia Tenggara itu mengurus dan membangun negara-negaranya masing-masing dalam suasana perdamaian dan persahabatan.

Jika kehadiran militer kedua super power itu, yaitu kehadiran angkatan lautnya, tidak dapat dihindari, karena mereka merasa perlu hadir sebagai global power, maka kehadirannya hendaknya sekecil mungkin untuk menghindari bentrokan-bentrokan yang membahayakan perdamaian di kawasan ini.

Itulah salah satu makna gagasan pembentukan daerah damai, bebas dan netral, dan kita bertekad keras untuk melaksanakan gagasan tersebut.

Kehadiran kedua super power itu dalam bentuk kerjasama ekonomi dan teknik, kita sambut dengan baik. Asal tidak mencampuri urusan dalam negeri kita.

Sudah tentu perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara itu hanya akan dapat bertahan, jika didasarkan tidak saja pada politik dan kebutuhan jangka pendek tetapi oleh politik jangka panjang semua negara di Asia Tenggara ini.

Untuk lebih memperluas kawasan damai ini, Indonesia senantiasa menyokong pelaksanaan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Samudera Indonesia sebagai Samudera Perdamaian. Itulah sebabnya kita tidak setuju dengan pembangunan pangkalan Amerika Serikat di Diego Garcia.

Peningkatan kegiatan militer dan kalau ada, pembangunan pangkalan oleh Uni Sovyet di Samudera ini, pun tidak kita setujui.

Itulah garis besar politik yang selama sepuluh tahun terakhir ini kita tempuh dan lakukan dalam rangka memperkuat perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan Samudera Indonesia. Kiranya jelaslah bahwa dengan politik luar negeri yang bebas aktif itu, di sini kita telah berhasil selama 10 tahun terakhir, memberikan sumbangan yang positif.

PERSOALAN TIMOR TIMUR

Segi selanjutnya masih tetap dalam rangka keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara, juga pentinglah penyelesaian persoalan soal Timor Timur. Dekolonialisasi berupa pernyataan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat untuk berintegrasi dengan Indonesia telah kita terima baik dan sahkan melalui cara-cara konstitusi kita. Sekarang daerah ini telah menjadi propinsi kita dan urusan dalam negeri kita. Dengan demikian persoalannya bagi kita telah selesai, dan setiap campur-tangan dari luar akan kita tolak dengan tegas.

Hasil pembicaraan baru-baru ini dengan pemerintah Portugal yang menghasilkan pengembalian duapuluhan tiga tentara Portugal dan sejumlah warga-negara negara tersebut ke tanah airnya merupakan hal yang positif. Hasil perundingan itu telah meletakkan dasar-dasar bagi hubungan lebih baik nanti antara Portugal dan Indonesia.

Sudah tentu masih saja akan ada orang-orang di luar negeri, anggota-anggota Fretelin dan penyokong-penyokongnya yang tetap tidak akan menerima kenyataan itu. Tetapi mereka itu tidak akan menghalangi kehendak rakyat Timor Portugis untuk tetap melanjutkan pembangunan propinsinya bersama dengan saudara-saudara lain dari tanah air kita.

Mungkin saja masih akan ada negara-negara yang mempersoalkan soal Timor Timur itu di pertemuan-pertemuan internasional. Tetapi meskipun kita akan menjelaskan duduknya perkara yang sebenarnya, kita akan menegaskan juga bahwa soal ini sekarang telah menjadi soal dalam negeri kita yang tidak ingin dicampuri orang asing.

Pernah ada pihak yang mengatakan bahwa Indonesia telah diisolasi dunia karena di Dewan Keamanan diambil resolusi terhadap Indonesia dengan limabelas X nol, kemudian sekali lagi dengan duabelas lawan tiga.

Ini bukan pertandingan bola. Waktu itu tentu saudara-saudara ingat, di Dewan Keamanan kita pernah juga bertanding berkali-kali mengenai Irian Barat dan dikalahkan. Tetapi Irian Barat akhirnya masuk juga. Jadi sekali-kali hal itu jangan dilupakan !

Semuanya itu bukan isolasi. Perlu saya terangkan bahwa banyak negara mengatakan bahwa mereka tidak berkeberatan bahwa Timor Timur ber-integrasi dengan Indonesia, tetapi itu harus menjadi hasil kehendak rakyat secara bebas dibawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang mereka tidak setujui adalah apa yang mereka sebut intervensi militer Indonesia. Sekaligus banyak di antara negara-negara itu menyatakan bahwa sikap mereka terhadap Indonesia mengenai Timor Timur sekali-kali tidak mengurangi hubungan baik mereka dengan kita. Malahan kemudian bantuan ekonomi mereka kepada kita mereka tingkatkan.

Jadi memang jika dilihat dari jauh, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tidak mengetahui duduknya perkara, soalnya hanya dapat dilihat dari sudut apa yang mereka sebut tindakan militer, meskipun kita menerangkan bahwa yang memberi bantuan itu sukarelawan kita. Kita sendiri pun secara prinsipieel menentang penyelesaian suatu perselisihan internasional dengan kekuatan senjata. Itu prinsip kita, juga prinsip yang dianut bangsa-bangsa lain.

Tetapi setelah kita jelaskan duduknya perkara, banyak negara yang menunjukkan pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat Timor Timur itu dengan penggabungannya dengan Indonesia itu de-kolonisasi, membebaskan diri dari penjajahan Portugal.

Mereka juga mengerti penjelasan kita mengapa ada bantuan sukarelawan, karena persoalannya dipaksakan oleh perkembangan kejadian kepada kita bangsa Indonesia yang harus mengambil sikap jangan sampai kekacauan di daerah perbatasan itu berlarut-larut tanpa penyelesaian dan akan membahayakan perdamaian dan pembangunan negara kita.

Sebab banyak orang tadinya tidak mengetahui, bahwa turunnya sukarelawan di sana itu disebabkan tersebarnya 14.000 pucuk senjata. Penyebaran inilah yang menimbulkan perkelahian antara keluarga

atau antara saudara. Dan juga senjata-senjata ini, yang berada di tangan orang-orang yang menimbulkan conflicten di daerah-daerah perbatasan-perbatasan kita. Dapatkah, bagi negara yang mempunyai kedaulatan, membiarkan kejadian-kejadian ini. Terus terang tidak ! Dari segi itu saja sudah harus ada tindakan untuk mengamankan. Tindakan pengamanan inilah yang diambil, atau sikap yang berlaku bagi sukarelawan-sukarelawan kita, secepatnya melucuti persenjataan di sana, mencegah meluasnya pendistribusian senjata-senjata tadi dan membantu rakyat agar mereka berhasil menyatakan keinginannya untuk menang.

Dan itu sudah kita lakukan.

Bawa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bersedia mengirim utusan menyaksikan pernyataan kehendak rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia, disayangkan. Tetapi Pemerintah Sementara Timor Timur maupun pemerintah Indonesia akan menyambut baik dan memberikan segala bantuan andaikata tempo hari itu utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu datang.

Sekali lagi, hubungan kita dengan luar negeri tetap berjalan baik dan tidak benar anggapan bahwa kita di-isolasi dunia.

Juga perlu sekali lagi kita tegaskan, bahwa dalam soal Timor Timur itu, kita tidak mempunyai ambisi territorial. Bagaimanapun, dulu, sekarang dan diwaktu yang akan datang, Indonesia sama sekali tidak mempunyai ambisi territorial apapun. Ini perlu kita jelaskan di sini.

Timor Timur kita terima, setelah mereka menyatakan ingin bergabung dengan kita, setelah missi pemerintah menyaksikan sendiri meluapnya semangat rakyat untuk ber-integrasi.

Setelah kita mempertimbangkan bahwa meskipun merupakan beban berat, tetapi kita tidak boleh mengecewakan keinginan rakyat Timor Timur itu.

Tidak boleh mereka kita kecewakan sesudah berintegrasi dengan kita. Dan kalau ada yang tidak setuju, biar mereka menyelidiki kembali sejarah nenek moyangnya yang ada hubungannya dengan kita. Inipun tidak bisa kita mungkiri. Memang benar !

KERJASAMA EKONOMI LUAR NEGERI

Bersamaan dengan usaha-usaha untuk memperkokoh perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara, politik luar negeri sejak dari permulaan Orde Baru ditujukan untuk bekerjasama dengan luar negeri untuk memperoleh dana-dana bagi pembangunan ekonomi, serta kerjasama ekonomi, teknik dan perdagangan.

Sebagaimana diketahui usaha-usaha yang dilakukan, terdiri dari rescheduling hutang-hutang lama dan memperoleh bantuan baru dan kerjasama dengan negara-negara I.G.G.I. Dalam rangka politik bebas aktif yang dilakukan dengan konsekuensi selama 10 tahun ini, kita beberapa tahun kemudian mulai dengan usaha-usaha yang sama dengan pelbagai negara sosialis di Eropa Timur. Usaha-usaha ini tidak segera dapat kita lakukan karena negara-negara itu mula-mula kurang percaya pada kita, tetapi akhirnya bersedia juga.

Dalam tahun-tahun terakhir ini kegiatan itu diperluas dengan hubungan-hubungan dengan sejumlah negara Timur Tengah.

Usaha-usaha tersebut berupa mula-mula bantuan devisa, bantuan proyek dan bantuan pangan dari negara-negara I.G.G.I., penanaman modal asing, perdagangan dan kerjasama internasional. Bantuan dan penanaman modal terutama dengan negara-negara I.G.G.I. dan negara-negara non komunis lainnya. Kalau mula-mula Indonesia hanya mampu menerima pinjaman lunak, sejak tahun 1973/1974 kita sudah juga dapat menerima pinjaman setengah lunak dan komersil, disebabkan karena kenaikan nilai ekspor minyak kita. Sejak dari itu kita pun bersedia menerima bantuan setengah lunak atau komersil itu dari blok Eropa Timur, kemudian menyusul negara-negara Timur Tengah.

Bantuan dari pemerintah-pemerintah maupun Badan-Badan Internasional itu pada umumnya dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur ekonomi kita yang berada dalam keadaan parah, serta pembangunan lain-lain yang sesuai dengan Repelita. Jumlah bantuan itu dari tahun 1967 hingga tahun lalu berjumlah US\$ 5 miliar, dan untuk tahun ini kebutuhan kita adalah US\$ 2,4 miliar.

Kebijaksanaan penanaman modal asing adalah memberi prioritas kepada proyek-proyek yang menambah ekspor, menghemat impor, padat karya, memasukkan teknologi baru atau yang segera memberikan hasil.

Untuk menjaga kepentingan nasional kita, serta melindungi pihak yang lemah dan mempercepat kemampuan kita untuk berusaha sendiri, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah Indonesianisasi dalam management dan staf, makin memperketat lapangan yang terbuka bagi kapital asing serta pribumisasi. Yang penting ialah mengatur perimbangan antara syarat-syarat yang cukup menarik bagi kapital asing dan keharusan menjaga kepentingan nasional, jangan sampai ekonomi kita dikuasai oleh pihak asing.

Pada waktu ini diperkirakan nilai penanaman modal asing seluruhnya berjumlah US\$ 4,8 miliar, dibanding dengan 1,2 miliar US\$ dalam tahun 1969.

Di dalam bidang perdagangan luar negeri kebijaksanaan kita ialah:

- memperbesar nilai ekspor
- mempertinggi mutu bahan-bahan ekspor kita
- mencari jalan memasuki pasaran-pasaran tradisionil dengan lebih baik
- mencari pasaran-pasaran baru
- mengekspor barang-barang jadi atau setengah jadi
- bekerjasama dengan negara-negara atau organisasi-organisasi asing untuk kepentingan pemasaran produksi kita.

Jika pada akhir tahun 1971 nilai ekspor kita baru berjumlah lebih kurang 1,8 miliar US\$ disebabkan terutama karena minyak, tetapi juga karena barang-barang ekspor lain, ekspor kita tahun lalu bernilai ± 7 miliar US\$. Jadi banyak yang tidak boleh saudara lupakan.

Dalam bidang kerjasama multilateral, Indonesia berpedoman pada Ketetapan M.P.R. dan Petunjuk Presiden untuk bekerjasama dengan sesama negara berkembang untuk kepentingan bersama dalam lapangan ekonomi. Forum-forum yang dipergunakan dalam hal ini adalah terutama kelompok 77 dalam UNCTAD dan di luar Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kelompok Non Aligned, O.P.E.C. dan Konferensi Ekonomi Internasional, yang terkenal dengan nama "North-South Dialogue."

Disinilah Indonesia senantiasa menyokong perjuangan menyusun Orde Ekonomi Internasional Baru yang adil menggantikan Orde Ekonomi Lama yang penuh ketidak-adilan.

Usaha-usaha tersebut di atas telah dapat membantu kita dalam usaha-usaha kita membangun dengan sukses selama sepuluh tahun.



Adam Malik membacakan isi ceramahnya.

Menurut hasil penelitian suatu team yang dipimpin oleh Menteri Riset baru-baru ini yang dilaporkan kepada Sidang Paripurna Kabinet:

- a. pembangunan telah membawa hasil-hasil positif dan mengurangi kemiskinan absolut.
- b. hasil penelitian membesarkan hati dan menambah kepercayaan pada diri sendiri.
- c. pembangunan bukan hanya berhasil baik, tetapi merata dan atas dasar konsepsi yang baik.
- d. namun demikian masalah-masalah masa depan tetap besar dan tantangan tetap berat, tetapi kita harus dan dapat mengatasinya.
- e. untuk itu kita harus bersikap hemat dan bekerja keras melaksanakan Repelita. Yang dimaksud hemat adalah bekerja baik dan effektif tetapi tetap maju, tidak mundur.

Demikianlah kesimpulan team peneliti itu.

Jika dapat saya menambah sedikit, memang "negara kita pada dewasa ini menghadapi tugas pembangunan berat dengan hutang-hutang yang besar. Maka dari itu dapatlah didengar kekhawatiran yang terdapat di pelbagai kalangan bahwa:

- hutang kita pada luar negeri tidak boleh meningkat terus saban tahun, tetapi makin lama harus makin turun.
- beban hutang berat nanti bagi anak cucu kita.
- bantuan luar negeri kurang dipergunakan secara effektif.
- pola konsumsi kita sekarang terlalu besar bagi suatu bangsa yang demikian banyak hutangnya. Hidup sederhana karena itu tidak boleh menjadi seruan saja, tetapi harus dilaksanakan.

Saya kira Pemerintah pun sangat sadar akan semuanya itu, meskipun tidak membenarkan. Tetapi kalau hasil penelitian di atas itu dipakai sebagai pedoman, yaitu kerja keras, hemat tetapi tetap maju, kiranya kita tidak boleh berkecil hati atas kemampuan kita untuk mengatasi segala tantangan itu. Kalau melihat kemampuan ekspor kita, sebenarnya pembayaran kembali hutang-hutang itu masih dapat dipertanggung jawabkan yaitu jauh di bawah 20 prosen dari nilai ekspor kita. Nilai ekspor kita tahun terakhir adalah 7 miliar US\$, sedangkan pembayaran kembali hutang tahun ini ditaksir 400 juta US\$, dan makin lama makin meningkat, tetapi tetap di bawah 1,4 miliar US\$.

Jadi saudara-saudara lihat masih di bawah 20 prosen. Jangan terlalu khawatir seperti yang sering kita dengar ketakutan itu. 20 prosen dari ekspor kita yang 7 miliar tadi masih berjumlah 1,4 dan ini pun belum sampai sekian. Hanya 400 juta dollar U.S. tiap tahun kita bayar, dan pembayaran ini tentu secara progresif akan tetapi masih di bawah 20 prosen tadi.

Tetapi soalnya bukan hanya soal angka-angka. Yang penting adalah iklim psikologis yang baik. Negara berhutang itu normal, hutang besar pun dapat, tetapi di mana hutang-hutang itu berhasil dipergunakan untuk memberantas kemiskinan rakyat dan meratakan hasil pembangunan, rakyat ikhlas bersama-sama memikul beban hutang itu.

Negara-negara yang memberi bantuan pada kita pun tentu mengamati kita dengan cermat, bagaimana kita mempergunakan bantuan itu. Bagi negara-negara berkembang yang mengeluarkan uang bantuan itu untuk keuntungan sekelompok elite saja, dengan tidak mengindahkan kepentingan dan kemiskinan rakyatnya, mereka meng-olok-olok dengan kata-kata: "Orang-orang miskin di negara kaya membantu orang-orang kaya di negara miskin."

Dalam hal kita, bantuan mereka kita pergunakan bagi kepentingan rakyat banyak, sampai ke desa-desa kecil-pun. Tidak mudah untuk memperoleh bantuan dari negara maju, tetapi karena negara-negara asing itu melihat bahwa kita berhasil dengan pembangunan kita, mereka bersedia membantu kita terus.

Sebagai ilustrasi, tadi siang saya menerima seorang wakil dari Negeri Belanda yang paling anti tentang pemberian bantuan kepada negeri kita. Tapi ia saya terima. Saya bertukar pikiran dengan dia lebih dari satu jam. Akhirnya saya tanyakan kepadanya. "Hentikanlah bantuan!" Sesudah mendengarkan keterangan saya itu, akhirnya dia seperti sangat terharu, hampir menangis. Saya terangkan: "Bantuan yang engkau berikan itu tidak ada artinya". Oleh karena bukan saja bantuan ini sudah kita pergunakan seluas mungkin. Tapi jumlahnya kurang. Baru dia lihat, setelah saya buktikan kepadanya dengan segala macam angka, bahwa bantuan itu bukan membantu sekelompok manusia yang ada di Jakarta saja. Lihat ini bantuanmu di Ujung Kulon! Ini bantuanmu di Sumatra! Ini bantuanmu di sana! Jadi bantuan itu jatuh langsung pada rakyat. Apa yang mengenai irigasi, apa yang mengenai kehutanan, bantuan-bantuan itu tidak ada yang tersangkut di Departemen-Departemen. Baru dia mengatakan: "Yah

inilah yang perlu ! Kita perlu berdialog sering kali. Sebab kami anggap tidak perlu membantu Indonesia lagi." Jangan pakai koma lagi! Tentang tawanan, tawanan pun belum semua dilepas, "saya bilang. Jangan bikin tawanan itu sebagai alasan. Sikap inilah yang salah. Tawanan-tawanan ini akan dilepas. Kalau tidak ini hari, besok. Ya itu urusan lain. Bukan di sini. Itu urusan justisi, urusan kehakiman dan pengadilan. Tapi kalau urusan bantuan ini ada tidak ada soal tawanan rakyat harus maju, saya bilang. Jadi negeri Belanda yang ingin memajukan rakyat Indonesia, melalui saluran bantuan ini yang tidak boleh saudara-saudara lupakan, dan rakyat Belanda harus membantu. Jadi dia berjanji, dia akan berjuang di dalam partainya untuk merubah pandangan-pandangan yang sempit atau cara-cara yang selama ini salah alamat. "Mudah-mudahan!" Saya bilang.

Dengan semua itu saya tidak ingin katakan bahwa segala berjalan tanpa kekurangan dalam pembangunan itu. Jauh dari pada itu. Terutama effisiensi dalam pengaturan kerja dan pengeluaran dana pembangunan perlu kita pertinggi bersama-sama. Pemerintah juga bekerja keras untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki.

Sebaliknya mereka, pihak asing itu harus mengerti bahwa Indonesia bekerjasama dengan luar negeri untuk kepentingan bersama. Orde Ekonomi Internasional Baru menghendaki bahwa hubungan ekonomi antar negara itu harus memberikan keadilan dan meningkatkan taraf hidup rakyat miskin, dan Pemerintah Indonesia berkewajiban memberi kepentingan rakyat kita. Dalam hubungan itulah kita harus lihat kebijaksanaan kita dalam soal perminyakan dewasa ini.

Sebab masih ada juga orang yang melihat soal-soal ini bagaimana ini soal perminyakan. Yah dalam hal meningkatkan taraf hidup rakyat inilah. Jadi kalau saudara melihat pak Sadli mulai meminta tambahan hasil minyak, maksudnya hanya untuk meninggikan penghasilan negara supaya dapat dibagi lebih banyak kepada rakyat. Jadi jangan dikira, bahwa kita mau seenaknya. Bukan. Ada alasan kita yang kuat.

Semuanya itu dapat dicapai kalau ada saling pengertian dan saling menghormati antara pihak asing itu dengan kita. Kita akan tetap menghormati modal asing, sebaliknya mereka kita harapkan menghormati kita. Sikap saling menghargai inilah yang menjadi dasar kebijaksanaan kita.

Itulah Saudara-Saudara, secara singkat apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah sebagai kebijaksanaan selama Orde Baru dalam bidang kerjasama ekonomi dengan luar negeri.

Teranglah kiranya bahwa kebijaksanaan Pemerintah selama 10 tahun dalam hal ini telah membawa manfaat banyak bagi rakyat, bangsa dan negara.

HUBUNGAN DENGAN NEGARA-NEGARA BESAR

Mengenai hubungan dengan negara-negara besar dapat dikatakan sebagai berikut.

Sesuai dengan politik bebas aktif kita, kita selama 10 tahun Orde Baru itu senantiasa tidak memihak dalam pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Kita pun tidak bersedia terlibat dalam pertentangan antara Uni Sovyet dan Republik Rakyat Cina.

Secara bilateral hubungan kita dengan negara-negara besar itu adalah sebagai di bawah ini.

Hubungan dengan Amerika Serikat baik, dan negara ini adalah penyumbang penting dalam rangka I.G.G.I. Bantuan negara itu di luar rangka I.G.G.I. pun banyak membantu pembangunan kita. Tetapi politik kita tidak selamanya sejalan dengan politik Amerika Serikat.

Mengenai soal-soal seperti keterlibatan Amerika Serikat di Indocina, tuntutan Panama mengenai terusan Panama, persaingan militer yang berbahaya antara negara-negara besar di Asia Tenggara dan Samudera Indonesia, pembangunan pangkalan Amerika Serikat di Diego Garcia, kita berbeda faham. Juga mengenai perjuangan Orde Ekonomi Internasional Baru, di mana Amerika Serikat menjadi pemuka dari negara-negara maju terdapat perbedaan antara Amerika Serikat dan kita.

Jadi jangan saudara pikir, mentang-mentang kita terima uang, mentang-mentang kita mengadakan kerja sama ekonomi, jadi semua juga sudah beres. Tidak. Politik kita tetap. Jadi jangan salah kira!

Begitu juga mengenai lalu lintas kapal perang melalui Selat Malaka dan perairan Nusantara kita.

Itu dalam praktek ! Tekanan kuat sekali dihadapkan pada kita supaya kita harus terima sekian mil, kalau perlu. Belum tentu !

Ya mari kita bicara. Mari kita bicara terus. Bicara terus. Biar Amerika minta barangkali 300 mil, kita kasih 20 mil. Dia minta 200 mil kita kasih 10 mil. Begitulah. Terus kita berbeda. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak mengurangi kerjasama yang baik dan saling bermanfaat bagi kedua belah fihak. Dia masih untung dari kita. Kita pun masih untung dari dia. Jadi biarpun ada perbedaan politik, tetapi kerja sama ekonomi tidak merugikan dia dan tidak merugikan kita. Itulah sebabnya maka Amerika masih membantu kita, dan dia masih mau memberi bantuan.

Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak mengurangi kerjasama yang baik dan saling bermanfaat pada kedua fihak.

Dengan Uni Sovyet hubungan kita, sesuai dengan politik bebas kita, menjadi baik setelah beberapa tahun lamanya pernah dingin akibat peristiwa G.30.S./P.K.I.

Tetapi itu beberapa lama jadi normal kembali.

Perdagangan maupun kerjasama ekonomi dan teknik dalam 5 tahun terakhir ditingkatkan. Tetapi disinipun ada perbedaan-perbedaan antara kita. Misalnya dalam gagasan negara ini mengenai Asian Collective Security System yang mereka usulkan. Menurut kita rumusannya terlalu samar, hanya berisi bahwa hubungan antara negara Asia sebaiknya didasarkan atas Dasasila Bandung. Itupun pendirian kita, tetapi tidak perlu dituangkan dalam bentuk suatu sistem. Sebab jika dimaksudkan untuk membendung RRC dan itulah kesan umum, maka kita tidak dapat menyetujuinya. Dan pendirian itu adalah pendirian negara-negara Asia Non komunis lainnya.

Jadi bukan berarti Indonesia saja. Juga negara-negara non komunis lainnya tidak dapat menerima Collective Security ini karena ini dimajukan untuk membendung R.R.C. Jadi artinya kita menjadi alat Sovyet untuk melawan Cina. Tapi sikap itu tidak bisa kita terima. Itulah sebabnya biarpun kita berhubungan baik, biarpun kita berhutang pada Uni Sovyet, biarpun kita minta bantuan pada Uni Sovyet, dalam pinjam-meminjam uang maupun dalam proyek-proyek lainnya. Tapi itu tidak berarti, apa maunya bisa kita terima begitu saja. Dalam soal politik tidak begitu. Inilah salah satu contoh bahwa kita juga tetap konsekuensi dengan politik yang kita anut, baik terhadap Sovyet Uni maupun terhadap Amerika.

Hubungan kita dengan RRC sudah cukup diketahui. Yang penting mungkin saya kemukakan di sini ialah, meskipun dalam tahun 1967

kita bukukan hubungan sampai sekarang, sejak beberapa tahun ini kontak-kontak antara diplomat-diplomat kita dan RRC di luar negeri, diadakan kembali.

Jadi jangan saudara kira – banyak juga orang yang mengira-bahwa kita sejak tahun '49 telah mengadakan hubungan diplomatik dengan satu Cina, bukan dua Cina, Satu Cina yaitu dengan Peking. Tahun '49 ! Ya cobalah hitung jumlah tahunnya. Jadi sudah lama sekali. Baru tahun 1967 kita bukukan. Pembukuan ini tidak berarti bahwa tidak ada hubungan diplomatik. Tidak. Hubungan diplomatik tetap ada. Lain halnya dengan pemutusan. Hanya pencairan hubungan diplomatik yang belum. Dan pencairan itu juga memerlukan persiapan dan waktu !

Dalam pembicaraan saya beberapa kali dengan Menteri Luar Negeri RRC, terdapat pengertian kedua fihak bahwa pemulihan hubungan masih memerlukan waktu.

Antara Menlu Cina dengan saya sudah dibicarakan semua persoalan. Sebenarnya hubungan antara negara dengan negara sudah tidak ada persoalan lagi. Sudah bisa kita buka. Any time ! Setiap waktu ! Tapi ada persoalan di pihak kita. Persoalan di pihak kita itu ada dua macam. Persoalan *psikologis* dan persoalan *pengamanan*. Psikologis saudara tahu, kalau besok kita adakan hubungan dengan Cina, apakah saudara-saudara yang keturunan Cina di sini tidak berbalik lagi ? Loyalitasnya menjadi loyalitas Peking ? Itulah yang kita jaga. Jangan sampai kejadian. Karena itu kita memerlukan waktu. Kemudian, yang kedua kita memerlukan pengamanan. Apa arti pengamanan ini ? Pengamanan ini buat kita ada dua macam. Kalau statistik kita, kita lihat dulu, keturunan Cina ini jumlahnya cuma satu juta. Kemudian karena cepat berkembang, dia jadi dua juta. Kemudian waktu kita konflik dengan Cina di tahun 1967, jumlahnya tiga juta. Sekarang barangkali jumlahnya sudah 6 juta. Sesudah 10 tahun ! Jadi hal ini sudah tentu tak boleh kita abaikan. Jadi bagaimana caranya kita mengamankannya ini ? Dua macam caranya. Tentu secara *nasional*. Jadi mereka ini harus menjadi orang Indonesia yang loyal kepada republik. Itu tujuan kita. Kemudian kita harus menyusun ekonomi kita begitu rupa supaya jangan ada kelompok-kelompok ekonomi yang menguasai kepentingan golongan ini. Juga harus ada peraturan-peraturan yang tidak lagi memberikan prioritas-prioritas tetapi betul-betul memajukan sistem ekonomi buat seluruh bangsa. Untuk

hal inilah yang kita inginkan waktu. Kemudian saya tambahkan kepada Menteri RRC itu, saya perlu waktu buat me-reeducate (mendidik kembali) bangsa saya dari keturunan Cina ini dan juga supaya mereka benar-benar menjadi orang-orang baik kalau kita besok berhubungan.

Dia pun, jawabnya baik juga. "Saya juga memerlukan waktu, Pak Adam!" Sebab di Tiongkok masih banyak keturunan Cina berasal dari Indonesia, mereka juga sekarang loyalitasnya kepada RRC kurang, karena mereka tidak percaya sistem komunisme. Jadi kalau mereka sudah begitu, perlu saya didik lagi atau saya keluarkan dari Cina. Mereka jadi orang Amerika, mau kembali jadi orang Indonesia, kalau Pak Adam mau terima atau mau jadi orang Hong Kong, terserah kepada mereka. Tetapi RRC harus memberi waktu kepada mereka. Itulah sebabnya sekarang membanjir keluar mereka dari daratan Cina, banyak dikeluarkan karena mereka memang tidak yakin sistem komunisme dan tidak mau menuruti sistem itu. Dikeluarkan sekarang. Tentu tidak banjir air. Tapi banjir manusia. Diberi kelonggaran. Itulah alasannya mengapa belum kita normalisasi.

Jadi kalau saudara bertanya sekarang, "Kapan". Jawab saya, setiap waktu. Kalau sudah kita penuhi syaratnya. Ada yang gembira, ada juga yang bilang: "Ah itu belum tentu". Sudah tentu! Satu hari pasti normal hubungan kembali. Alasannya apa? Alasannya, persoalannya sudah diselesaikan dengan pemerintah Cina.

Kemudian negara ASEAN sudah memutuskan. Alasan kedua. Alasan ketiga, kita sedang mempersiapkan. Alasan keempat, pasti kita akan berhubungan. Tapi jangan tanya waktunya. Itu tidak dapat kita tentukan sekarang. Kalau saudara tanya pada Pak Harto, insya Allah barangkali sesudah Pemilu. Tapi kalau ada yang tanya lagi, Pemilu besok, ya nantilah kita lihat. Jadi sabarlah dalam hati. Insya Allah. Jika Tuhan mengizinkan, secepatnya. Kita akan usahakan!

Kita sadar bahwa RRC itu terlalu penting untuk tidak diadakan hubungan diplomatik dengannya. Tetapi pada waktu ini, untuk kepentingan dalam negeri kita, kita belum dapat memulihkan hubungan itu. Kiranya di dalam waktu yang tidak terlalu lama, hubungan itu dapat ditinjau kembali dan dipertimbangkan untuk dibuka kembali.

Mengenai hubungan bilateral kita dengan Jepang, selama Orde Baru

ini dapat dilihat meningkatnya hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara ini dari tahun ke tahun.

Jepang merupakan salah satu penyumbang utama dalam rangka I.G.G.I. Di luar I.G.G.I. hubungan kitapun banyak.

Yang menjadi kebijaksanaan pemerintah itu didasarkan atas kenyataan bahwa Jepang dan kita secara ekonomis memang saling membutuhkan.

Dalam pada itu kerjasama selama 10 tahun ini menunjukkan bahwa Jepang terutama usahawannya, perlu memperbaiki sikapnya, tidak hanya bekerja keras untuk mencari keuntungan. Mereka perlu menghormati perasaan rakyat di kawasan ini. Demonstrasi anti Jepang di Muangthai dan Indonesia tahun 1974 yang kita kenal dengan Malari, membuktikan hal ini.

Dalam tahun-tahun akhir ini banyak dilakukan usaha dari kedua fihak, pemerintah maupun swasta, untuk memperbaiki peranan negara ini dan image orang Jepang di masyarakat kita.

Pemerintah melanjutkan usaha-usaha di dalam hal ini.

Dari uraian di atas kiranya nyata bahwa di dalam 10 tahun terakhir ini, kita tidak hanya berhasil menjalankan politik bebas aktif menghadapi negara-negara besar, tetapi juga berhasil meningkatkan hubungan dan kerjasama kita dengan mereka itu, kecuali RRC, tadi.

Hubungan kita dengan Australia dan New Zealand juga sangat baik. Apakah itu dalam pemerintahan Gough Whitlam yang lama maupun pemerintahan sekarang. Oleh karena apa? Oleh karena kepentingan Australia, New Zealand dan Indonesia sama. Kepentingan kita, dia perlu dengan kita, kita perlu dengan dia. Oleh karena itu tidak banyak sebenarnya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dengan dia, kecuali pada waktu yang terakhir mengenai Timor Timur. Tetapi sebenarnya di luar dari persoalan itu, hubungan tambah baik, dan bantuan tambah banyak. Kalau Whitlam dulu memberikan 10 maka pemerintah yang sekarang telah memberikan 12. Kira-kira begitu, jadi ada kenaikan bantuan. Jadi kalau Whitlam juga memberikan 11 Pemerintah sekarang memberikan 13. Jadi ada kenaikan. Jadi dalam hal ini kita cukup menyadari dan cukup menginsafi bagaimana pentingnya hubungan antara Indonesia, Australia dan New Zealand.

NON-ALIGNED

Dalam masa Orde Baru dua kali telah kita ikut dalam konperensi negara-negara non-aligned, satu kali di Lusaka, ini maksudnya sama artinya konperensi puncak dan yang kedua di Aljazair dan tahun ini akan ikut juga di Kolombo. Jika di masa perang dingin dulu dapat dipahami apa perlunya non-alignment sebagai alat dan cara untuk berusaha mengurangi ketegangan, orang dapat bertanya apa kegunaannya dalam masa detente sekarang.

Partisipasi kita dalam non-alignment sejak masa detente itu didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut.

Meskipun detente itu baik, tetapi bahaya yang kita lihat ialah bahwa terdapat kecenderungan negara-negara besar yang telah berhubungan lebih mereda itu, untuk mengambil keputusan-keputusan penting, juga mengenai negara-negara lemah atau berkembang, tanpa berkonsultasi dengan negara-negara lemah itu. Oleh karena itu kita memerlukan forum di mana negara-negara itu dapat memperjuangkan kepentingannya, dan salah satu forum penting ialah Non-Aligned.

Jadi singkatnya negara-negara besar ini sesudah detente, sesudah mereka kongkou-kongkou di Helsinki, dunia dianggapnya sudah aman. Jadi antara mereka-mereka sudah bilang dunia aman. Apakah ini benar? Tadi dipermulaan keterangan saya, saya sudah jelaskan itu tidak semuanya benar. Tapi itu tidak apa. Yang paling tidak enak buat kita, mereka berbicara, membicarakan, memutuskan nasib kita. Tentang nasib orang-orang yang berkembang ini, artinya negara-negara yang berkembang ini. Kan ini tidak pantas. Karena itu dari segi inilah kita melihat pentingnya non alignment itu. Jadi kita belum bisa bilang, dunia sudah aman, sudah damai, sudah reda, sudah ada detente, sudah ada pertemuan Helsinki, dan kita boleh tidur. Tidak! Sebab negara-negara yang berkembang terutama anggota-anggota non alignment harus lebih aktif untuk menjaga jangan sampai nasibnya diputuskan oleh orang lain zonder berbicara atau zonder konsultasi dengan mereka. Inilah salah satu segi mengapa non alignment masih penting.

Detente yang sekarang itu masih terbatas pada Eropa, sedang di kawasan-kawasan lain masih terdapat banyak konflik-konflik berbahaya, yang juga mempengaruhi perdamaian dunia.

Dunia masih melihat adanya kolonialisme dan rasialisme, meskipun

perjuangan bangsa-bangsa menentang keduanya makin lama makin luas dan kuat.

Jadi ada dua alasan. Atau *tiga alasan*.

Pertama nasib kita dibicarakan zonder kita.

Kedua, detente itu berarti dibatasi di Eropa.

Ketiga, bahwa restan kolonialisme/rasialisme dan semacamnya masih ada yang belum selesai. Jadi dari ketiga alasan ini pun, saya kira, sudah tidak bisa saudara mengatakan, non alignment tidak penting. Penting!

Terutama perjuangan kelompok non-Aligned dalam bidang perekonomian makin lama makin menonjol dan penting, dan makin terasa pengaruhnya kepada dunia, juga kepada negara-negara yang maju dan kuat, yang sebelumnya tidak banyak menghiraukan kekuatan kelompok non-aligned itu.

Peranan negara-negara non-aligned di dalam perjuangan Orde Ekonomi Internasional Baru, sangat besar.

Dan karena Orde Lama Ekonomi Internasional itu sangat tidak adil, kita aktif menyumbang perjuangan Orde Ekonomi Baru itu.

Kebijaksanaan Delegasi kita, selama Orde Baru, ke Konperensi-Konperensi Non-Aligned itu, tetap konsekwensi berjalan di atas garis yang digambarkan di atas. Bebas, aktif, menentang kolonialisme, imperialisme dan rasialisme, menyumbang kepada usaha peredaan ketegangan internasional, dan mementingkan perjuangan ekonomi negara-negara Non-Aligned, yang kebanyakan adalah negara berkembang.

Meskipun kita bebas aktif di dalam pertentangan antara blok komunis dan blok Barat, tetapi di dalam persoalan negara kaya X negara miskin, kita wajib memperjuangkan kepentingan negara-negara miskin. Itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar kita.

Hanya saja, di mana mungkin, kita aktif mencari akomodasi, paling sedikit konsultasi antara kepentingan negara kaya dan miskin itu. Sebab di dalam dunia yang interdependent ini, persoalan-persoalan dunia itu sebaiknya diselesaikan melalui konsultasi, jika dapat, akomodasi. Bukan konfrontasi. Tetapi di mana kepentingan nasional kita memaksa kita memihak kepada kepentingan negara-negara miskin atau berkembang, kita berbuat demikian, tidak ada lain jalan.

Dengan demikian, politik luar negeri kita di dalam partisipasi kita dalam konperensi-konperensi Non-Aligned selama Orde Baru itu,

bersamaan dengan lebih menonjolnya persoalan-persoalan ekonomi, kita titik beratkan pada bidang ekonomi.

Selalu bebas aktif, tetapi di mana mungkin, kita membantu penemuan akomodasi antara kepentingan negara maju dan negara berkembang.

Di mana ini tidak mungkin, kita secara prinsipil dan konsekuensi, solider dengan negara berkembang.

Dari keterangan-keterangan tadi dapatlah saudara bayangkan bagaimana kira-kira posisi kita menghadapi konferensi non alignment di Kolombo. Tadi saya sudah kemukakan alasan-alasan mengapa kita anggap non alignment itu penting. Jadi dalam konferensi Kolombo yang akan datang ini pun kita harus mengambil satu prakarsa. Tentu saudara-saudara ingin tahu prakarsa apa. Tadi sudah saya kemukakan. Tentu di samping persoalan-persoalan politik yang tidak banyak menonjol karena ada keredaan tadi, tentu kita harus mencari apa yang penting. Kalau saudara-saudara berpikir, sejak mulai kita melahirkan hubungan non alignment ini, kalau dulu di Bandung semboyannya *anti penjajahan*. Yaitu dengan suara keras kita agitasi anti imperialism. Demikian tentu kita mendapat tepukan. Orang pun sudah puas. Tetapi sekarang orang sudah maju hampir 20 tahun. Tentu orang sudah biasa tentunya mendengar semboyan-semboyan saja. Oleh karena itu kita harus mencari isi. Isi perjuangan kemerdekaan yang mereka capai. Atau yang dicapai oleh negara-negara yang sesudah bangun. *Ekonomi*. Inilah yang harus kita pikirkan. Memang ini berat sekali. Oleh karena ekonomi minta duwit. Saudara tidak punya duwit. Yah sebenarnya kita menyumbang juga. Jadi oleh karena itu kita titik beratkan pada *tiga soal*.

Pertama tentu hutang. Semua negara teman-teman gede itu punya hutang. Dan kita juga salah satu negara non alignment yang merasakan beratnya hutang itu. Tetapi mudah-mudahan kita dapat keluar dari kesulitan ini. Kan pantas bahwa pengalaman kita tidak hanya menyusun bagaimana dapat mengatasi hutang kita kemukakan kepada mereka. Kita ajak mereka membicarakan mengatasi persoalan hutang yang mereka derita dari dunia yang menggencet mereka. Jadi saya kira, psikologinya kena dan terasa.

Yang kedua kita akan bawa mereka nanti ke dalam soal *mengenai fund*. Tiap negara miskin mengharapkan bantuan. Tiap negara kaya ingin memberikan bantuan jangan terlalu banyak. Kira-kira begitu

keinginan anggota-anggotanya. Mari kita cari kompromi. Kita sudah mempelajari banyak fund ini, fund itu, tetapi belum juga sampai berhasil karena terlalu banyak debat. Kalau banyak orang membicarakan fund — itu hasilnya kurang banyak, tetapi jumlah yang tidak banyak ini pun belum juga keluar. Berbicara nanti dalam UNDP, mau bikin bank, tetapi semua mengemukakan angka-angka, uangnya belum juga kelihatan. Sekarang kita harus cari jalan dengan mengkompromikan. Ini fund, biarpun kecil supaya keluar. Begitulah. Supaya dirasakan manfaatnya oleh negara-negara yang membutuhkan fund itu. Bantuan itu. Ini yang kedua.

Yang ketiga kita pikirkan *soal moneter*. Soal moneter ini banyak seginya. Dagang dan lain-lain. Ketiga soal ini pun kita kemukakan secara konstruktif. Jadi bukan secara somboyan. Tetapi kita harus bisa angkat bicara memecahkan problem ini. Kalau hal ini nanti bisa kita bawa di Kolombo saya kira akan bisa bermanfaat pertemuan Kolombo yang akan datang.

Inilah kira-kira gambaran yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara mengenai non alignment dan politik luar negeri kita.

Saya pindah kepada persoalan *Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya P.B.B. masih tetap banyak faedahnya. Ini pasti. Apa pun yang saudara kritik mengenai PBB ini tidak ada badan lain yang dapat kita harapkan kecuali dia. Oleh karena itu kita harus terima tetapi kita juga tidak boleh bosan untuk mendapatkan cara bagaimana memperbaikinya.

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Dua kejadian penting di mana Indonesia tersangkut langsung dalam kegiatan P.B.B. dalam masa Orde Baru adalah antara lain pengesahan P.B.B. atas hak penentuan nasib sendiri di Irian Jaya dalam tahun 1969 dan partisipasi kita dalam pengawasan gencatan senjata di Timur Tengah setelah pengakhiran perang Arab-Israel oleh P.B.B. dalam tahun-tahun 1967 dan 1973.

Permintaan sumbangan kepada kita oleh P.B.B. dalam usaha penyelesaian persoalan Timur Tengah membuktikan apresiasi badan tersebut

terhadap peranan kita dalam masalah itu, meskipun kita senantiasa memberi sokongan kepada salah satu fihak yaitu pihak Arab.

Dalam pada itu kita dapat melihat bahwa P.B.B. sering tidak mampu untuk menyelesaikan pertikaian-pertikaian, terutama perselisihan-perselisihan politik, termasuk soal keanggautaan P.B.B. Soalnya ialah karena cara pengambilan keputusan oleh Dewan Keamanan dengan hak veto oleh anggota tetap, yang sering tidak cocok dengan pendirian mayoritas seperti tergambar dalam Sidang Umum. Maka dapatlah dimengerti bahwa banyak negara-negara dalam tahun-tahun terakhir itu mengambil keputusan-keputusan di Sidang Umum di mana mereka mempunyai mayoritas. Kiranya suatu badan seperti P.B.B. dapat lebih effektif dan berwibawa jika badan penting seperti Dewan Keamanan itu mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan pendirian mayoritas di General Assembly. Dan ini sampai sekarang masih selalu bertentangan.

Meskipun demikian Indonesia selama masa Orde Baru itu, setelah aktif kembali sejak 1966, terus menyokong usaha-usaha badan tersebut dan mempergunakannya sebagai forum penting untuk memperjuangkan kepentingan kita di segala bidang.

Pada akhir uraian saya ini saya akan menerangkan aktivitas kita mengenai Wawasan Nusantara kita dan perairan nasional.

Kita telah mengambil bagian dalam pelbagai konperensi hukum laut yang diselenggarakan oleh P.B.B. Hasil perjuangan kita selama bertahun-tahun itu ialah bahwa prinsip Wawasan Nusantara itu difahami dan diterima oleh negara-negara lain. Artinya prinsip bahwa negara kepulauan seperti kita dengan seluruh perairan di antara pulau-pulau itu dianggap sebagai satu daerah nasional.

Yang menjadi persoalan ialah di mana prinsip itu dilaksanakan dan mengenai kepentingan tradisionil negara-negara maritim, terutama negara maritim besar. Mereka menuntut hak untuk lalu lintas tanpa hambatan melalui perairan nusantara maupun selat-selat kita.

Persoalan lain adalah mengenai kepentingan tetangga-tetangga kita, yang terkena oleh prinsip Wawasan Nusantara itu. Soal-soal dengan tetangga telah atau sedang kita selesaikan atas dasar saling menguntungkan. Juga dengan negara-negara besar kita dalam prinsip setuju untuk suatu penyelesaian kompromi.

* * *

Saudara-saudara tentu mengetahui bagaimana pentingnya Wawasan Nusantara ini. Barangkali dengan tidak disadari, tetapi perlu soalnya kita tanamkan kuat-kuat dalam hati. Tidakkah dalam nyanyian kita selalu kita sebutkan Indonesia Tanah Airku. Cari kata-kata dalam lagu kebangsaan orang asing. Tidak ada kata tanah dan air. Paling-paling dia bilang hanya tanah saja. Air tidak disebut. Tetapi pada kita ada. Jadi ingat itu. Begitu pentingnya buat kita air ini. Karena memang benar keadaannya kalau saudara lihat kepulauan kita dikelilingi oleh laut-laut. Tidak bisa kita terpisah dari laut. Tetapi kalau kita kembali kepada hukum laut maka laut ini laut orang lain. *Laut internasional!* Kan ini tidak adil. Jadi kalau begitu soal ini harus kita sukseskan. Orang lain itu harus menerima prinsip Wawasan Nusantara kita. Ini tidak bisa lain. Ini buat kita hidup mati kita. Jadi oleh karena itu *kesukaran kita ada dua macam. Menghadapi negara tetangga*, karena negara tetangga ini memerlukan air perairan kita, saya sebut saja Malaysia. Malaysia tentu kaget waktu kita sebutkan Wawasan Nusantara ini. Bagaimana hubungan Malaysia antara Sabah dan Kuala Lumpur. Jadi laut itu laut Indonesia? Jadi saya bagaimana? Memang keberatan ini kita amankan. Bagaimana pengamanannya? Secara hubungan bilateral. Hubungan bilateral dan kembali kepada sejarah. Tidak pernah putus laut itu oleh karena perbedaan faham antara Majapahit dengan Sultan di Pahang atau dengan Sultan di Perak. Begitu juga sekarang biarpun konfrontasi tidak pernah kita blokir itu hubungan. Sekarang pun itu akan kita jamin, kita berikan jaminan, bahwa hubungan antara Indonesia Malaysia mengenai Wawasan Nusantara di mana ada laut yang memisahkan juga mereka tidak akan diganggu dalam hubungan antar daerah mereka selama dunia masih berkembang. Malaysia tentu terima! Begitu juga dengan Thailand. Pernah timbul urusan menangkap ikan. Timbul urusan minyak laut, hal-hal itu pun akan kita selesaikan. Tetapi prinsip itu perlu buat kita. Hidup mati kita di sana. Hal ini harus kita perjuangkan. Oleh karena itu dengan negara tetangga barangkali lebih mudah kita selesaikan perbedaan. Tetapi yang lebih susah dengan negara besar. Siapa negara besar itu tadi telah saya sebutkan yaitu negara maritim, Amerika, Rusia atau Jepang dan lain-lainnya. Mereka ini ingin lalu lintas ini bebas. Jadi seenaknya, kalau istilah kita. Ini buat kita tidak bisa. Jadi kita katakan kamu boleh bebas dalam pelayaran ini, tetapi atas ridla kita. Tetapi kalau kapalnya

nanti kapal silam, kapal itu harus keluar ke atas permukaan laut. Harus keluar. Tidak boleh seenaknya. Harus ada pengaturan, kita pun sebenarnya sudah lunak dalam hal ini, artinya sudah mau kompromi. Sudah mau kita membela kepentingan mereka. Inilah sekarang yang sedang diperjuangkan. Bagaimana perjuangan ini tentu saja saudara-saudara tahu, bahwa tidak mudah mengalahkan negara-negara yang kuat, yang punya bom atom. Amerika Serikat dan Rusia, dua-dua punya bom atom. Kemudian, yang lain punya duwit lagi. Yaitu, Jepang. Dengan Jepang ini ruwet sekali. Tetapi kita terus berusaha meyakinkan mereka bagaimana pentingnya buat kehidupan bangsa Indonesia laut ini, Wawasan Nusantara ini. Mudah-mudahan kalau usaha ini berhasil, saya kira akan jelaslah diakui hukum laut kita atau hukum laut yang kita perjuangkan sekarang ini yang menjadi bagian dari pada cita-cita kita, menjadikannya Wawasan Nusantara tadi. Kemudian ada tadi yang belum saya singgung, saya ingin menyunggunya juga. Tentu pada saudara timbul pertanyaan, bagaimanakah kita memperbaiki PBB itu? Sebab dalam waktu beberapa tahun ini di PBB sendiri sudah ada Panitia PBB untuk mempelajari perubahan Charter PBB. Hal ini sulit sekali. Dari tahun ke tahun bicara-bicara terus menerus, tapi tidak pernah ketemu. Karena ada hak veto tadi. Jadi kalau kita mau merubah, yang maut kita. Makanya kita harus mencari pemikiran baru, bagaimana supaya tujuan PBB tercapai, untuk mengatasi semua konflik, tetapi juga kepentingan-kepentingan negara-negara yang besar dan kaya ini juga tidak merasa seperti ditekan atau dirugikan. Karena itu dari pengalaman kita, timbul pikiran pada kita yaitu ini haruslah diadakan penguatan atau stressing atau tekanan kepada region. (Wilayah — Red. Idayu). Jadi umpamanya, sekarang para anggota PBB ini mempunyai tujuh atau delapan region di dunia, jadi tiap-tiap region ini membicarakan dulu persoalannya. Umpamanya kita lihat di Asia Tenggara. Kita bicarakan saja dulu soal Asia Tenggara. Kalau negara-negara di Asia Tenggara, anggota-anggota PBB, sudah bulat baru kita bawa ke Sidang Umum. Sehingga Sidang Umum itu tidak lagi membicarakan persoalan yang bukan persoalannya. Hal ini tidak akan merugikan kepentingan negara yang mempunyai veto dan negara yang tidak mempunyai veto. Nah begitu juga dengan persoalan di Afrika. Saudara tidak tahu bukan ada persoalan apa di sana. Jadi kenapa kita harus bawa soal itu ke Sidang Umum. Tentu kita berdebat! Ada orang yang bertanya, dia pikir Timor berada

di Tibet. Kasihan dia bukan? Dia pikir di Tibet. Padahal pikiran itu itu berpokok anti Cina. Jadi dia pikir Timor ada di Tibet. Maka ia bersikap anti. Padahal Timor itu di Indonesia. Banyak hal-hal yang orang lain tidak tahu. Tapi dia mau ikut juga bicara. Beginilah pengalaman kita dalam sidang-sidang internasional apalagi seperti sidang PBB. Kita pun sering juga begitu. Malahan baru-baru ini saja Kissinger ditanya tentang nama suatu kepala negara Afrika dia tidak ingat. Malahan salah. Karena sulitnya persoalan, itulah sebabnya. Di region masing-masing mereka hapal persoalan mereka. Tetapi di region lain, tidak. Karena itu sekarang kalau pikiran ini bisa kita kembangkan di PBB, menitik beratkan persoalan kepada regional, saya kira PBB ini bisa kita selamatkan. Tapi kalau tidak, pasti akan bertentangan terus menerus, antara Security (Council) dengan Assembly, antara anggota Security Council sendiri, dan demikianlah seterusnya. Jadi kalau saudara-saudara mau lebih konkret umpamanya, soal Sahara sekarang. Bagaimana saudara memecahkan soal Sahara. Padahal semula negara-negara di Afrika ini, ada tiga negara Afrika, Mauritania, Maroko, Aljazair, sudah sepakat, kepala-kepala negaranya sepakat untuk menyelesaikannya. Kemudian timbul konflik antar mereka. Mereka berpisah. Aljazair mengklaim, yang lain mengklaim, akhirnya tuduh menuduh. Akhirnya mereka bentrok. Akhirnya dibawa ke PBB. Hal ini mau dibawa lagi barangkali di konperensi non aligned. Bagaimanakah saudara memecahkan persoalan ini? Saudara tidak pernah ke sana bukan? Saya sendiri tidak pernah. Bukankah lebih baik kalau orang di daerah itu, di region itu membicarakan, memutuskan dulu persoalannya dan keputusan itu kita terima bersama. Cara inilah yang disebutkan penyelesaian secara regional yang akan membantu keputusan PBB dalam menghadapi persoalan-persoalan yang lebih berat. Saya kira inilah jalan yang lebih praktis. Tapi jalan ini pun masih banyak anggota-anggota yang belum mau menerimanya.

Demikianlah uraian saya, sudah tentu banyak soal yang belum saya singgung. Tetapi kiranya soal-soal yang terpenting telah saya uraikan.

Kiranya jelaslah bahwa politik luar negeri kita selama 10 tahun terakhir ini telah memenuhi pedoman maupun pedoman kerja yang ditentukan MPRS tahun 1966 dan MPR 1973, yaitu mengabdikannya untuk kepentingan nasional, terutama kepentingan ekonomi dan penderitaan rakyat, dengan usaha-usaha:

- a. memperkuat kerjasama regional, yaitu ASEAN,
- b. memperkuat keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara,
- c. bekerjasama dengan semua negara untuk pembangunan terutama pembangunan ekonomi,
- d. menyumbang kepada usaha-usaha dunia untuk penyelesaian masalah-masalah internasional,
- e. memperjuangkan kepentingan bersama dengan negara-negara sesama berkembang, khusus dalam bidang ekonomi.

Dengan demikian politik luar negeri selama Orde Baru telah berhasil menyumbang kepada ketahanan nasional kita maupun kepada ketahanan regional ASEAN.

Berhasilnya politik luar negeri bebas aktif kita selama 10 tahun terakhir ini, untuk mengabdi kepada kepentingan nasional, kepentingan rakyat banyak, di dalam suasana persahabatan dan kerjasama dengan bangsa-bangsa di dunia ini, apapun ideologinya, adalah berkat landasan politik kita yang objektif berpijak kepada kepentingan bangsa dan negara.

Tadi barangkali tidak saya singgung. Juga dalam kerja sama internasional sendiri, dalam konferensi Islam, dalam organisasi konferensi negara-negara Islam, Indonesia turut. Biarpun kita tidak termasuk anggota. Mengapa kita tidak masuk anggota, oleh karena dalam Charter disebut negara Islam. Kita tidak negara Islam. Dalam hal ini terjadi lama sekali perdebatan, tetapi mereka tidak bisa memungkiri dan mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang bermajoritas Islam. Yang terbanyak lagi jumlahnya pengikut Islam dari semua negara anggota-anggota konferensi. Tentu kita tidak sombong. Tentu kita terima rumusan itu. Akhirnya Indonesia menjadi "anggota hadir tetap". Walaupun itu masih dalam istilah charter, tetapi kita tidak pernah absen. Dari konferensi permulaan di Maroko sampai ke konferensi Istanbul kita tetap hadir. Ini perlu kita kemukakan biarpun kita bukan anggota, kita sudah mem-

berikan sumbangan-sumbangan kita sesuai dengan kepentingan nasional kita tadi. Juga dalam usaha perdamaian sebagaimana disebut dalam amanat MPR tadi.

Dan pelaksanaannya dilakukan di bawah pimpinan Bapak Presiden kita, yang dengan kebijaksanaan pribadinya, di dalam maupun di luar negeri, senantiasa memberi bimbingan baik kepada kita semua. Pengertian serta bantuan seluruh lapisan rakyat juga merupakan sumbangan yang besar dalam hal ini.

Sekianlah uraian saya, semoga ada gunanya kiranya.
Terima kasih.

Jakarta, 7 Agustus 1976.



DAFTAR KARYA ADAM MALIK

Malik, Adam.

Djawaban wakil perdana menteri bidang sosial politik/menteri luar negeri; diutjapkan didepan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada tanggal 24 Mei 1966. Djakarta. Kementerian Penerangan R.I., 1966. 31 hal. (Penerbitan chusus no. 414).

Keterangan wakil perdana menteri bidang sosial politik/menteri luar negeri; diutjapkan didepan sidang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong pada tanggal 5 Mei 1966. Djakarta, Kementerian Penerangan, 1966. 16 hal. (Penerbitan chusus no. 412).

Kita mengabdi politik luar negeri Indonesia kepada kepentingan nasional, pidato Menteri Utama bidang politik pada perayaan 17 Agustus 1966 di Irani Barat, Djakarta, Deppen. Direktorat Visuil, 1966. 32 hal.

Politik luar negeri Indonesia dipimpin oleh falsafah Pantja - Sila; pidato di muka sidang DPR - GR pada tanggal 5 Mei 1966. Djakarta, Kementerian Penerangan Direktorat Visuil, 1966. 32 hal.

Riwayat dan perjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Cet. ke 6. Djakarta, Widjaja, 1975. 108 hal.

Riwayat dan perjuangan sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Diperlengkap oleh orang-orang yang langsung ikut menjelenggarakan Proklamasi 17 Agustus 1945. Tjet. ke 5. Djakarta, Widjaja, 1970. 88 hal.

Sovjet Rusia, seperti jang saja lihat. Djakarta, Endang, 1954. 164 hal.

17. ALI SASTROAMIDJOJO, S.H.
Empat mahasiswa di Negeri Belanda
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 475.-
18. Drs. ZUBER USMAN (SP.-SS.)
Bahasa Melayu sebelum dan sesudah menjadi Lungua Franca
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 500.-
19. Prof. S. TAKDIR ALISJAHBANA
Perkembangan sejarah Kebudayaan Indonesia dilihat dari jurusan nilai-nilai
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 400.-
20. Ny. SUJATIN KARTOWIJONO
Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 350.-
21. YAYASAN IDAYU
Kilasan petikan sejarah Budi Utomo
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 1.600.-
22. Dra. S.K. TRIMURTI
Hubungan pergerakan buruh Indonesia dengan pergerakan kemerdekaan Nasional
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 375.-
23. BAHDER DJOHAN - STEN ADAM
Di tangan wanita (Pidato tahun 1926)
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 400.-
24. DR. T.B. SIMATUPANG
Ketahanan nasional dalam situasi baru di Asia Tenggara
1976. (cetakan ke. 2) Rp. 425.-
25. S U D I R O
Pengalaman saya sekitar 17 Agustus 1945
1975. (cetakan ke. 2) Rp. 450.-
26. Prof. SOEGARDA POERBAKAWATJA
Suatu pemikiran mengenai pendidikan di Indonesia
1975. (cetakan ke. 2) Rp. 450.-
27. Prof. DR. HAMKA
Doktrin Islam yang menimbulkan kemerdekaan dan kebenaran
1975. (cetakan ke. 1) Rp. 450.-
28. WILOPO, S.H.
Zaman pemerintahan partai-partai dan kelemahan-kelemahannya
1976. (cetakan ke. 1) Rp. 800.-
29. MOHAMMAD NATSIR
World of Islam Festival dalam perspektif sejarah
1976. (cetakan ke. 1) Rp. 450.-
30. MARY LUTYENS
Pustaka Kirshnamurti
1976. (cetakan ke 1 dalam bahasa Indonesia) Rp. 3.000.-
31. DR. SARINO MANGUNPRANOTO
Pendidikan sebagai sistem perjuangan kemerdekaan Indonesia
1976. (cetakan ke. 1) Rp. 450.-
32. ADAM MALIK
Sepuluh tahun politik luar negeri Orde - Baru
1976. (cetakan ke. 1) Rp. 450.-
33. MOHAMMAD SAID REKSOHADIPROJO
Taman Siswa's - Gedachten wereld
1976. (cetakan ke. 1) Rp. 200.-

Penjual tunggal : P.T. GUNUNG AGUNG
Kwitang 6 - Tromolpos 145
JAKARTA PUSAT

YAYASAN IDAYU

T u j u a n

- * membantu Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa dan isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima dalam:
 - a. meningkatkan kecerdasan umum bangsa Indonesia
 - b. memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.
- * membantu Pemerintah Republik Indonesia, dalam bidang pembangunan pada umumnya dan dalam lapangan penyelidikan ilmiah, pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan, pada khususnya.